

LAPORAN KINERJA

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Triwulan III
Tahun
2025



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Joni Haryadi D

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)

Ketua Tim Penyusun

Gleni Hasan Huwoyon

Kepala Sub Bagian Umum

Anggota Tim Penyusun

Adinda Rizkylia Shahrani

Sub Koordiantor Kelompok Tata Operasional

Armin Hidayat

Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha

Endah Susiyanti

Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Teknis

Sekretariat

Shella Savitri

Staf Kelompok Tata Operasional

Yuni Setyowati

Staf Kelompok Tata Operasional

Susiyanti

Staf Kelompok Tata Operasional

Iswahyudi

Staf Kelompok Tata Operasional

Ipan Dahniar

Staf Kelompok Tata Operasional

Kontributor

Ifana Agustina

Staf Kelompok Tata Usaha (Kepegawaian)

Dewinta Hesti Widyastantri

Staf Kelompok Tata Usaha (Keuangan)

Fitri Rahmawati

Staf Kelompok Pelayanan Teknis

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat ijin dan rahmat-Nya penyusunan buku "Laporan Kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Triwulan III Tahun Anggaran 2025" dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas BRBIH dalam melaksanakan Program Perikanan budidaya ikan hias

untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya erat kaitannya terselenggaranya good governance yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BRBIH Triwulan III Tahun 2025 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja TA 2025. Laporan ini sangat penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja organisasi pada Triwulan III TA 2025. Capaian Kinerja ini dapat tercapai berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran pegawai BRBIH baik instuktur, fungsional lain dan personil manajerial. Diharapkan pada tahun 2025 kegiatan-kegiatan yang diamanatkan pada BRBIH dapat terlaksana secara optimal sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telibat dalam penyusunan Laporan Kinerja BRBIH Triwulan III Tahun 2025 ini, atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Kami membuka sekiranya jika ada saran dan masukkan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaan SDM	4
E. Sistematika Laporan Kinerja	5
F. Potensi dan Permasalahan	6
II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahun 2025	13
C. Perjanjian Kinerja	15
D. Pengukuran Kinerja	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	36
IV. PENUTUP	41
A. Capaian Kinerja	41
B Permasalahan dan Rekomendasi	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Triwulan III Tahun 2025	vii
Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias	8
Tabel 3. Program BRBIH Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja T	ahun
2025)	14
Tabel 4. Program BRBIH Tahun 2025 (berdasarkan spantint.kemenke	J.go.id) 14
Tabel 5. Rincian Revisi DIPA	14
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2025	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025	19
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator 1	20
Tabel 9. Bobot Nilai IKPA 2025	22
Tabel 10. Kategori Nilai IKPA	22
Tabel 11. Rincian Komponen Penilaian SAKIP BRBIH	24
Tabel 12. Bobot Variabel Penilain Nilai Kinerja Perencanaan Anggar	an BRBIH
(Nilai)	25
Tabel 13. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	25
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 6	
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja 8	33
Tabel 16. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025	37
Tabel 17. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Triwulai	n III Tahun
2025	37
Tabel 18. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2025	38
Tabel 19. Capaian Kinerja BRBIH Triwulan III 2025	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRBIH	vi
Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH	4
Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Triwulan III 2025	4
Gambar 4. Status Indeks capaian IKK	17
Gambar 5. Dashboard Kinerjaku BRBIH Triwulan III Tahun 2025	18
Gambar 6. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BRBIH Triwulan III T	ahun 2025
	22
Gambar 7. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2025	26
Gambar 8. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025	26
Gambar 9. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025	27
Gambar 10. Kategori Nilai IP ASN	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan visi dan misi BRBIH, pada Januari 2025 BRBIH telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) dengan Sekretaris BPPSDMKP. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap Kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja sebanyak 9.

Pengukuran capaian kinerja BRBIH tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRBIH Triwulan III Tahun 2025 sebesar 107,83%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRBIH

Capaian Kinerja BRBIH Triwulan III Tahun 2025, diukur untuk 3 indikator kinerja, 2 indikator kinerja dengan status hijau dan 1 indikator kinerja bernotifikasi biru. Dengan rincian target sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Triwulan III Tahun 2025

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	ľ	NDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN III	CAPAIAN TRIWULAN III	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	85	100,00
	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	-	-	-
	Manusia Kelautan dan Perikanan	3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	-	-	-
	4	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	-	-	-
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	80	100	120,00
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	-	-	-
		8	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000	155.000.000	160.435.380	103,51
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-	-

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRBIH pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 5.397.996.530,- atau 49,20% dari pagu anggaran Rp. 10.969.977.000,- (pagu di perjanjian kinerja). Sedangkan realisasi yang bersumber dari spant kemenkeu per tanggal 30 september 2025 persentase realisasinya menjadi 69,55% dari pagu Rp 7.761.516.000,-.

Pada Triwulan III 2025, kinerja BRBIH dapat tergolong baik, namun demikian secara umum selama triwulan III terdapat permasalahan yang dihadapi dan berpotensi untuk menghambat capaian kinerja di triwulan berikutnya. Permasalahan berdasarkan sasaran kinerja utama adalah terkait dengan target PNBP senilai 210.000.000 dengan capaian sebesar Rp 160.435.380,- atau 76,40%. Penurunan permintaan ikan hias dan magot merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya memenuhi target capaian PNBP. Untuk mengantisipasi tidak tercapainya target PNBP, maka direkomendasikan untuk melakukan promosi ikan hias dan kegiatan eduwisata melalui media sosial BRBIH dengan harapan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap ikan hias dan magot di BRBIH.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRBIH. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH. Akhirnya, BRBIH berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



Bab Pendahuluan



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- b) Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan:
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan:
- g) Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Balai Riset Budidaya Ikan Hias sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BRBIH dalam pencapaian visi

dan misi organisasi. Laporan Kinerja BRBIH Triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BRBIH serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BRBIH guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi BRBIH, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisias kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

B. Tujuan

Laporan Kinerja BRBIH merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini memiliki dua tujuan, yaitu:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRBIH untuk meningkatkan kinerja.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, BRBIH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM).

BRBIH mempunyai tugas melaksanakan riset budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut berdasarkan lingkungan fisik, dengan fungsi:

- 1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya ikan hias;
- Pelaksanaan riset perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut meliputi perbenihan dan sistem, reproduksi, domestikasi dan pemuliaan sumber daya plasma nutfah

Ikan hias, nutrisi dan teknologi pakan, sistem ikan, lingkungan, serta teknologi budidaya ikan hias;

- 3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut;
- 4. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- 5. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- 6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut BRBIH di dukung oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagaimana berikut:

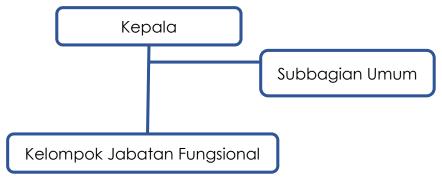
a. Subbagian Umum

Subbagian umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala BRBIH dengan tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

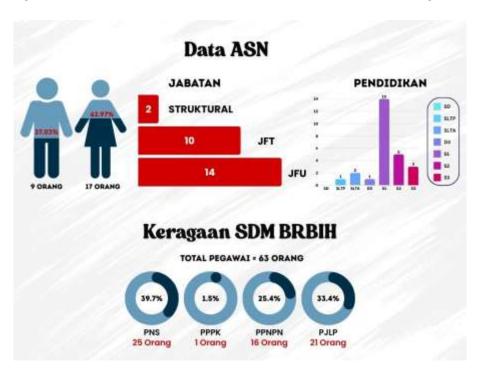
Struktur organisasi BRBIH sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 77/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH

D. Keragaan SDM

SDM BRBIH pada triwulan III Tahun 2025 sebanyak 63 orang yang terdiri dari 26 orang dengan status ASN, 16 orang dengan status PPNPN, dan 21 orang dengan status PJLP. Adapun komposisi SDM BRBIH, sebagai berikut:



Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Triwulan III 2025

E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

a. Cover Laporan

b. Kata Pengantar

Pada bagian ini berisi tentang pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan, dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BRBIH

c. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama triwulan III Tahun 2025.

d. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

e. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

f. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

g. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

h. Lampiran

Bab ini berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu

F. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

1. Sumber Daya Manusia

Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mendukung pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya ikan hias. SDM di balai ini terdiri dari instruktur, teknisi akuakultur, teknisi lapangan dan tenaga administrasi yang kompeten di bidangnya.

Para instruktur, teknisi akualutur dan teknisi lapangan di balai riset ini memiliki pengalaman luas dalam teknik budidaya ikan hias, baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi modern. Mereka juga berkompeten dalam manajemen pakan, kualitas air, dan pengendalian penyakit, yang menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya ikan hias.

Dengan adanya SDM yang handal, BRBIH turut aktif dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini mendorong terciptanya inovasi dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam budidaya ikan hias.

Tidak hanya itu, BRBIH juga terus mendukung pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan dalam budidaya ikan hias melalui program pelatihan dan workshop. Dengan keahlian yang

dimiliki, SDM di Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan industri ikan hias Indonesia, menciptakan peluang pasar baru, serta mendukung konservasi spesies ikan hias yang langka dan bernilai ekonomi tinggi.

2. Sumber Daya Ikan

Potensi ikan hias Indonesia tidak hanya bersumber dari air tawar, ikan hias laut juga cukup prospektif untuk dikembangan, selain dari itu kita sadari bahwa potensi ikan hias akan mengalami eksploitasi yang berlebihan apabila dimanfaatkan secara tidak efisien, tidak dikelola secara arif dan bijaksana dan akhirnya kekurangan persediaan atau bahkan kehilangan spesies. Sebagai pasar ikan hias terbesar di dunia, adanya regulasi pasar ikan hias di Eropa yang mensyaratkan ekspor beberapa komoditas ikan hias harus dari hasil budidaya dapat menjadi peluang dan tantangan yang sangat dibutuhkan guna menembus pasar tersebut.

Melihat hal tersebut maka BRBIH sebagai satker di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak dalam pengembangan budidaya ikan hias tentu saja berpotensi sangat besar untuk mendukung peningkatan produksi nasional. Saat ini, sumberdaya ikan yang masih dibudidayakan di BRBIH terdiri atas ikan hias air tawar dan masih dibudidayakan, diantaranya Ikan Arwana, Koi, Discuss dan Platy disamping budidaya komoditas maggot sebagai pakan alternatif. Ikan hias dari hasil samping kegiatan riset beberapa tahun sebelumnya masih terpelihara sebagai ikan koleksi yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung yang datang ke BRBIH.

3. Sarana dan Prasarana

Selain potensi berupa SDM dan Sumber Daya Ikan, BRBIH juga memiliki potensi sarana dan prasarana berupa lahan yang dimiliki seluas 12,5 Ha dengan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan. Sejak beralihnya fungsi riset di tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian fungsi sarana dan prasarana yang ada dan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster, diantaranya cluster loca feed, cluster tanaman hias air dan cluster arwana. Penggunaan lahan untuk fasilitas lainnya masih terus dikembangkan dan dituangkan dalam site plan BRBIH yang disiapkan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru nantinya. Fasilitas-fasilitas yang tersedia saat ini disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias

NO	FASILITAS	FUNGSI	KEGIATAN		
1	Laboratorium Uji	Lab. Genetika	analisa molekuler seperti RAPD, PCR, MHC, Uji KHV		
		Lab. Nutrisi	-		
		Lab. Kualitas Air	analisa kualitas air dengan berbagai parameter fisika dan kimia seperti Amonia, Nitrit, Nitrat, Suhu, Oksigen Terlarut, pH, Alkalinitas, Kesadahan, TSS, Konduktivitas,		
		Lab. Biologi	Budidaya tanaman hias air		
		Lab. Pakan Alami	Budidaya pakan alami berupa moina dengan hasil samping cacing beku		
2	Hatcheri/	Aquatia 1	Budidaya ikan hias platy		
	hanggar	Aquatia 2	Budidaya ikan hias Koi dan Koki		
		Aquatia 3	Gedung serba guna		
		Aquatia 4	Budidaya discuss dan pemeliharaan ikan koleksi		
		Cluster Arwana	Budidaya ikan hias arwana		
		Cluster Loca Feed	Budidaya magot dan produksi pakan buatan dengan produk turunan magot		
3	Kolam/Bak	Kolam Beton	Pemeliharaan Ikan Koi		
	Pemeliharaan	Kolam Tanah	Budidaya ikan koi		
		Bak Beton	Budidaya ikan platy, pembesaran ikan koki		
4	Gedung Penunjang	Gedung Administrasi	Pusat keadministrasian BRBIH		
		Gedung Instruktur	Ruang kerja instruktur dan teknisi serta mahasiswa PKL/Magang		
		Guest house	Sarana pendukung untuk tamu dan peserta magang, pkl dan penelitian		
		Showroom	Sarana untuk menampilkan berbagai jenis ikan hias sebagai sumber edukasi bagi masyarakat		
		Musholla	Sarana ibadah umat muslim di lingkungan BRBIH		
		Stokist Room	Sarana penyimpanan barang persediaan dan barang operasional perkantoran		

b. Permasalahan

Saat ini masalah dan tantangan yang sedang dihadapi BRBIH dalam pelaksanaan program untuk mendukung pembangunan KP diantaranya adalah beralihnya fungsi riset ke BRIN menyebabkan tugas dan fungsi BRBIH sebagai Balai Riset menjadi tidak relevan lagi untuk saat ini. Belum terbitnya peraturan perundangan perihal Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) akibat peralihan riset mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.



Bab — Perencanaan Kinerja



II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), BRBIH berperan dalam mendukung Rencana Strateais BPPSDMKP. Visi BPPSDMKP sebagaimana tercantum dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Visi BPPSDMKP sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam Renstra BPPSDMKP dijelaskan bahwa mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan Misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP melaksanakan 2 dari 8 Misi/ Asta Cita KKP yang dirumuskan sebagai berikut :

- "Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan" yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- 2. "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusian Kelautan dan Perikanan" yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana tercatum dalam Renstra BPPSDMKP, Sasaran Strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 "Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten". Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan ke dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- SP-1: Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan Indikator:
 - Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/ atau Dunia Kerja;
 - 2. Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/ atau Dunia Kerja;
 - 3. Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Kelasnya.
- SP-2: Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat, dengan indikator:
 - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang dimanfaatkan oleh Masyarakat;
 - 2. Desa Perikanan Cerdas/ Smart Fisheries Village (SFV) yang menerapkan ilmu dan pengetahuan teknologi hasil kelautan dan perikanan;
 - 3. Percontohan penyuluhan dan pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan.

- SP-3: Terselenggaranya Tata Kelola yang mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator:
 - Aparatur penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya;
 - 2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mendukung penyuluhan dan pengambangan sumber daya manusia kelautan dn perikanan;
 - Sarana dan prasarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang meningkat kapasitasnya;
 - 4. Lembaga penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tersertifikasi/ terakreditasi;
 - 5. Hasil pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
- SP-4: Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDMKP dengan indikator:
 - 1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB).

Berdasarkan Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029, maka pada tahun 2025, BRBIH mendukung SS-4 KKP dengan Sasaran Program (SP)-4 BPPSDMKP. Dalam mendukung SP-4 tersebut, BRBIH mengacu kepada Rencana Kerja KKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2024.

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan mengacu kepada Rencana Kerja KKP dan BPPSDM, pada tahun 2025 ditetapkan 1 program kerja pada BRBIH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Program BRBIH Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

	, , ,	,
PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (RP)
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.969.977.000
	Jumlah Anggaran	10.969.977.000

Sedangkan pagu berdasarkan spanint.kemenkeu.go.id per 1 September 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. Program BRBIH Tahun 2025 (berdasarkan spantint.kemenkeu.go.id)

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (RP)
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7.761.516.000
	Jumlah Anggaran	7.761.516.000

Seiring berjalannya kegiatan terdapat beberapa perubahan DIPA, walaupun tidak merubah program dan jumlah pagu anggaran sampai dengan 31 Agustus 2025, dilakukan beberapa penyesuaian dalam dukungan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Revisi DIPA

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Bulan pengesahan	2 Desember 2025	-
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	-
	Belanja barang	6.410.000.000	-
	Total	10.969.977.000	
1 Tanggal		2 Desember 2025	21 Februari 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
		Revisi Blokir Anggaran berdasaraka	n :
	Keterangan	surat Sekretaris BPPSMKP Nomor Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Lingkup BPPSDM TA 2025	
2	Tanggal	21 Februari 2025	9 April 2025

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi			
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000 6.410.000.000			
	Belanja barang	6.410.000.000				
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000			
		Revisi Rekomposisi Blokir Anggaran B				
	Keterangan	Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-327/AG/. Tanggal 9 April 2025 Perihal Pengesahan Revisi Anggara Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.				
		Pada revisi ke 2 ini tidak terdapat pe hanya ada pembukaan blokir bela langganan daya dan jasa, serta ho	nja gaji PPNPN dan PJLP, belanja			
3	Tanggal	9 April 2025	21 April 2025			
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000			
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000			
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000			
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan D	ana pada Halaman III DIPA			
4	Tanggal	21 April 2025	8 Juli 2025			
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000			
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000			
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000			
	ana pada Halaman III DIPA					

C. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran program dan kegiatan secara optimal dan tepat waktu, pada tahun 2025 disusun Perjanjian Kinerja BRBIH dengan 1 sasaran kegiatan (SK) yang harus dicapai sebelum akhir tahun. Untuk mengukur keberhasilan SK, ditetapkan ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan IK BRBIH pada tahun 2025 berjumlah 9 IK, dengan rincian pada PK sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2025

No	KEGIATAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85
	adri sarker	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80
		8	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90

D. Pengukuran Kinerja

Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRBIH Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, sehingga diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capain IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Adapun status Indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Status Indeks capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRBIH dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja di lingkup BRBIH yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: 19/BRBIH/RC.610/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Sekretariat BPPSDMKP.



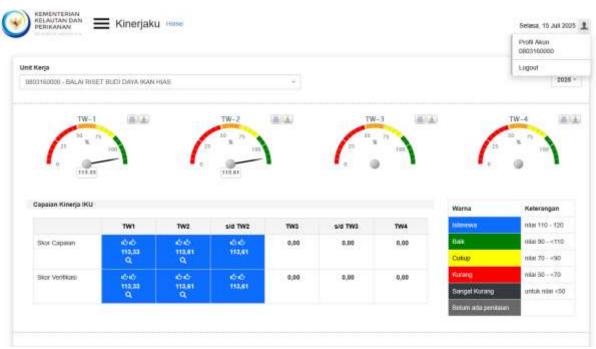
Bab S Akuntabilitas Kinerja



III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IK yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias tahun 2025 dapat tercapai. Pencapaian SK dengan IK tahun 2025 yang mengacu pada Logical Framework Analisis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRBIH di tingkat korporat pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 107,83% dengan 1 IK berstatus biru, 2 IK berstatus hijau sebagaimana dashboara kinerjaku berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku BRBIH Triwulan III Tahun 2025

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan kinerja analisis dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRBIH. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRBIH yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Tabel 7. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS		NDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN III	CAPAIAN TRIWULAN III	%
1	Tata Kelola	1	Persentase Balancas alasi Hasil	85	85	85	100,00
	Pemerintahan yang		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang				
	Efektif dan		dimanfaatkan				
	Akuntabel bidang		untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)				
	Penyuluhan dan	2	Indikator Kinerja	92	-	-	-
	Pengembangan		Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)				
	Sumber Daya						
	Manusia Kelautan	3	Penilaian Mandiri	81,5	-	-	-
	dan Perikanan		SAKIP BRBIH (nilai)				
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	-	-	-

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	١	NDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN III	CAPAIAN TRIWULAN III	%
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	80	100	120,00
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	-	-	-
		8	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000	155.000.000	160.435.380	103,51
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-	-

Sasaran Kegiatan 1

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tuntasnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 di BRBIH. Berdasarkan Nota Dinas Kepala BPPSDMKP Nomor 953/BPPSDM/HP.510/X/2025 hal "Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dan Persentase JUmlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP", capaian atas indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator 1

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK – 1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH (%)										
Realisasi TW III Tahun 2021 - 2024			2025			% Target Jangka Kenaikan Menengah		-		
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III 2025	% Capaian	2024 - 2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
		75	100	85	85	85	100,00	-15,00	89	95,51

Data diatas menunjukkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH mendapat nilai capaian sebesar 85% (100%) dari target 85% dan mengalami penurunan sebesar 15% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III 2024. Penurunan capaian tersebut bukan dikarenakan adanya penurunan kinerja dari tahun 2024 tetapi dikarenakan pada Tahun 2024 BRBIH memiliki 2 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti hingga tuntas seluruhnya dan menghasilkan nilai 100%, sedangkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 BRBIH tidak memiliki rekomendasi yang harus di tindaklanjuti sehingga capaiannya sesuai dengan target yaitu 85%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2029) 89, capaian pada triwulan ini baru mencapai 95,51%.

Program/Kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan capaian pada IKM ini yakni Layanan Manajemen Keuangan melalui rutinnya pengendalian internal yang dilaksanakan setiap minggunya oleh pimpinan dan penanggung jawab kegiatan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan briefing pagi dan sore setiap harinya di masing-masing cluster terhadap faktor-faktor yang sekiranya berisiko yang didukung oleh komitmen pimpinan yang selalu terlibat dalam pengawasan internal.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini misalnya dengan melakukan rapat SPIP bulanan secara rutin untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi, selain itu operator SIDAK yang rutin mengantrol LHP pada aplikasi.

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan

menggunakan 3 indikator penilaian yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan rincian variabel sebagai berikut:

Tabel 9. Bobot Nilai IKPA 2025

No	Indikator	Bobot			
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran					
1	Revisi DIPA	10			
2	Deviasi RDP (halaman III DIPA)	15			
Aspek Kualitas	Pelaksanaan Anggaran				
3	Penyerapan anggran	20			
4	Belanja kontraktual	10			
5	Penyelesaian tagihan	10			
6	Pengelolaan UP dan TUP	10			
7	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA			
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran					
8	Capaian output	25			

Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada http://spanint.kemenkeu.go.id dengan kategori nilai IKPA sebagai berikut:

Tabel 10. Kategori Nilai IKPA

No	Nilai IKPA	Kategori
1	<u>></u> 95	Sangat Baik
2	89 <u><</u> Nilai IKPA<95	Baik
3	70 <u><</u> Nilai IKPA<89	Cukup
4	<70	Kurang

Berdasarkan penjelasan diatas, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai) Triwulan III 2025 dapat dilihat pada data berikut :



Gambar 6. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BRBIH Triwulan III Tahun 2025

Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan merupakan kegiatan yang mendukung tercapainya IK ini. Aktivitas yang telah dan akan tetap dilakukan untuk kegiatan yang telah dilakukan sejak awal tahun hingga trwiulan III adalah penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulanan, penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi keuangan sejak April s.d September, penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara dan penyampaian laporan capaian output setiap bulannya pada aplikasi SAKTI.

Indikator Kinerja 3

Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)

Indikator ini mengukur kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan oleh BRBIH. Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai PM SAKIP BRBIH pada tahun 2025 adalah 81,5 dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Indikator ini baru akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025, meskipun demikian kegiatan yang mendukung agar tercapainya IK ini telah dilaksanakan sejak awal Tahun 2025 dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja, Manual IK, Pohon IK, Rencana Aksi, Rincian Target IK, DIPA, RKA-K/L, Matriks Peran Hasil (MPH), SK Tim LKj dan SK Tim SAKIP yang kemudian dipublikasikan melalui website BRBIH agar mudah di akses oleh publik sebagai salah satu kriteria penilaian SAKIP yang harus terpenuhi, pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja pertriwulan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan

untuk menilai bagaimana BRBIH melakukan evaluasi kinerja internalnya sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Selain itu juga telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola SAKIP BRBIH melalui pelatihan SAKIP yang diselenggarakan oleh KKP.

Pada tanggal 10-12 Juni 2025 telah dilakukan Penilaian Mandiri yang berlokasi di BRBIH Depok bersama dengan verifikator dari Sekretariat BPPSDMKP, nilai yang diperoleh BRBIH adalah sebesar 84.25 (A) dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Komponen Penilaian SAKIP BRBIH

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	13,35
4	Evaluasi Internal	25	20,50
		Total Nilai	84.25
		Predikat	Α

Indikator Kinerja 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian

capaian setiap indikator dengan bobot dan kategori pada masing-masing indikator sebagaimana berikut:

Tabel 12. Bobot Variabel Penilain Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

No	Variabel	Uraian	Bobot
1	Efektivitas (75)	Capaian RO	75
2	Efisiensi (25)	Penggunaan SBK	10
		Efisiensi SBK	15

Tabel 13. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Kategori	Nilai KPA
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	> 80-90
3	Cukup	> 60-80
4	Kurang	< 50

Indikator ini baru akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV 2025 dengan target yang harus dicapai sebesar 71,5. Sementara itu hingga Triwulan III 2025 rangkaian kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dimulai dari melakukan monitoring realisasi anggaran setiap layanan agar tidak melebihi indeks Satuan Biaya Keluaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, melakukan penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA/ RKAKL sesuai kebijakan dan kebutuhan organisasi, serta melaporkan Progres Capaian Realisasi Output (PCRO) setiap bulannya pada Aplikasi SAKTI.

Indikator Kinerja 5

Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui gambaran indeks profesional ASN lingkup BRBIH yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal KKP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Berdasarkan peraturan tersebut,

Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas setiap tahunnya.

Sesuai dengan surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 terdapat penyesuaian formula perhitungan untuk IP ASN BKN, berdasarkan surat tersebut penilaian IP ASN KKP pun ikut menyesuaikan. Pada dimensi kompetensi mengalami penyesuaian sebagai berikut:

											NSTRUM	MEN		
	JENIS			вовот о	DIKLAT		DIKLAT		DIKLAT		PENGEMBANGAN KOMPETENSI			
JABATAN	JABATAN	HASIL PENILAIAN KINERJA				The East of the State				120000000		0.048064AF257		
		Sangat Baik	Balk	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=20 JP	A
Manajenal	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	*:	+:			5	proporaional
	Jabatan Administrator	-25	20	15	10	5	10	0				+	6	proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0			,	- 4	5	proporsional
Non Manajeriai	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-		10	0	*	*	5	proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5					10	0	5	proporsional

Gambar 7. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2025

Sedangkan pada indikator Kualifikasi tahun 2025 mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki sebagai berikut :

landara labatan	Pendidikan yang diperoleh								
Jenjang Jabatan	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA			
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	25	20	10	10	10			
Jabatan Administrator	25	25	20	10	10	5			
Jabatan Pegawas	25	25	25	20	10	10			
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	25	25	25	20	10			
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	25	20	10	10	10			
Jabatan Pelaksana	25	25	25	25	20	10			

Gambar 8. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025

Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja sebagai berikut :

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

Gambar 9. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDMAO KKP dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Adapun penilaian IP ASN tersebut meliputi 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%) dan Disiplin (5%) dengan pengkategorian sebagai berikut:

Kategori	Nilai
Sangat Tinggi	91 - 100
Tinggi	81 - 90
Sedang	71 - 80
Rendah	61 - 70
Sangat Rendah	0 - 60

Gambar 10. Kategori Nilai IP ASN

Hingga Triwulan III 2025, dari 26 ASN yang dinilai, seluruhnya telah mengikuti Diklat 20 JP baik melalui aplikasi e-Milea maupun kegiatan lainnya. Untuk dimensi kualifikasi berdasarkan pendidikan dan jabatan yang diduduki, pada Triwulan III ini terdapat 1 pegawai yang telah mencantumkan gelar S-1 pada jabatan pelaksana sehingga memberikan nilai tambah dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai pada dimensi kinerja adalah berdasarkan pada nilai SKP Tahun 2024 serta nilai dimensi disiplin yang dimiliki oleh masingmasing pegawai. Berdasarkan 4 (empat) dimensi yang dinilai, dengan sumber data IP ASN per ASN pada website myasn.bkn.go.id yang kemudian

dirata-ratakan, diperoleh IP ASN BRBIH Triwulan III Tahun 2025 sebesar 88,65. Nilai ini masih akan berfluktuasi jika terdapat penambahan atau pengurangan ASN dan pencantuman gelar pendidikan, penurunan kedisiplinan pegawai di triwulan ke IV.

Dalam menunjang pencapaian target IK ini, melalui kegiatan Layanan Manajemen SDM secara berkala telah dilakukan aktivitas penyesuaian atau update data kepegawaian pada aplikasi e-pegawai dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), rekapitulasi kehadiran pegawai sebagai monitoring disiplin pegawai setiap bulannya serta kegiatan pengadministrasian dan rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per triwulan.

Sementara itu, untuk terus meningkatkan capaian pada indikator kinerja ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi berikut:

- a. Mengajukan pencantuman gelar bagi pegawai yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar.
- b. Tetap melakukan upaya penegakan disiplin melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung dan melalui sosialisasi tentang disiplin pegawai kepada seluruh pegawai BRBIH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang memuat kewajiban dan larangan bagi PNS.
- c. Selalu rutin melaksanakan evaluasi kinerja periodik sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Indikator Kinerja 6

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam SIRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Sementara Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Kegiatan/Program yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung capaian kinerja yaitu Kegiatan Layanan Umum. Pendataan belanja barang yang akan diumumkan awal tahun pada aplikasi SIRUP dilakukan berdasarkan data belanja barang pada DIPA/ RKKKL awal yang disahkan pada tanggal 2 Desember 2024. BRBIH telah mengumumkan

seluruh pagu pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Bulan Januari 2025. Penyesuaian atau update data pengadaan pada aplikasi SIRUP sesuai dengan data revisi belanja barang dilakukan pada Bulan Maret pasca adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan surat dari Plt Kepala Biro PBJ KKP Nomor B.873/SJ.6/RC.420/III/2025 Tanggal 4 Maret 2025 perihal Upaya Optimalisasi Perencanaan PBJ (RUP Terumumkan TA 2025) pasca pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran. Penyesuaian pagu anggaran terumumkan pada aplikasi SIRUP telah dilakukan pada bulan April 2025 pasca pembukaan blokir anggaran, pemutakhiran revisi POK di bulan Juli serta penghapusan blokir pada bulan September.

Merujuk pada penyesuaian pagu tersebut maka capaian BRBIH berdasarkan Nota Dinas Nomor 3115/BPPSDM.1/PL.410/X/2025 Tanggal 9 Oktober 2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III TA. 2025 dapat dilihat data berikut:

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 6

Daya	SK — 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan IK — 6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)											
Realisasi TW III Tahun 2021 - 2024										rget Jangka Menengah		
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III 2025	% Capaian	2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2029		
-	_	-	_	80	80	100	125,00	-	84	119,05		

Indikator Persentase RUP PBJ ini merupakan IK baru pada Tahun 2025 sesuai yang menjadi IK mandatory dari BPPSDMKP sebagai salah satu upaya untuk menjaga transparasi rencana pengadaan barang dan jasa level UPT. Sesuai data di atas dapat dilihat bahwa BRBIH memperoleh realisasi capaian sebesar 100% dari target 80% (persentase capaian kinerja 120%) pada Triwulan III ini, dikarenakan merupakan IK baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2029) capaian tahun ini telah tercapai sebesar 119,05%.

Faktor penentu keberhasilan tercapainya IK ini antara lain:

- Aktif melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian yang ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025.
- 2. Mengumumkan seluruh pagu pengadaan di BRBIH melalui aplikasi SIRUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Indikator Kinerja 7

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)

Indikator Kinerja ini menggambarkan Tingkat Kepatuhan dalam Pengelolaan BMN di BRBIH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator ini merupakan indikator dengan target tahunan dengan target yang harus di capai pada akhir tahun sebesar 80 (delapan puluh) dengan polarisasi maximize. Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%) diukur berdasarkan hasil evaluasi dengan parameter yang telah ditetapkan berikut:

- 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
- Tersedianya usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/ atau penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);

- 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%);
- 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).

Berdasarkan parameter penilaian tersebut, melalui kegiatan layanan umum telah dilakukan penyusunan laporan BMN tahun 2024 pada bulan Januari 2025, proses penyusunan laporan semester 1 selama Januari s.d Juni dan pada Triwulan III 2025 BRBIH telah melaksanakan kegiatan berupa :

- 1. Penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun 2025;
- 2. Penyampaian usulan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan portal KKP untuk:
 - a. Penghapusan BMN kondisi rusak berat;
 - b. PSP BMN;
 - c. RKBMN 2027

Indikator Kinerja 8

Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak, pedoman umum PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 tahun 2015 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 tahun 2021 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan

Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Obyek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Adapun PNBP BRBIH pada Tahun 2025 ini bersumber dari "Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, dan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya"

Berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDM a.n. Kepala BPPSDM Nomor 3143/BPPSDM.1/ KU.340/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Laporan Final Capaian Kinerja PNBP Triwulan III Tahun 2025 Lingkup BPPSDM sebagaimana data capaian pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja 8

Kel	SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan IK – 1 Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)												
	Re	ealisasi TW II T 2020 - 2023			2025	2025 % Target Jangk Kenaik Menengah							
20 21	20 22	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III 2025	% Capai- an	- an 2024 - 2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029			
		9.080.000	41.717.525	210.000.000	155.000.000	160.435.380	103,51	284,58	255.256.313	62,85			

Jika dilihat pada tabel diatas capaian BRBIH mencapai Rp. 160.435.380,- atau 103,51% dari target TW III dan 62,85% dari target jangka menengah (Tahun 2029), Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 284,58 %. Kenaikan capaian tesebut salah satunya disebabkan oleh telah terbitnya PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, pada PMK tersebut telah ditetapkan jenis PNBP untuk komoditas magot, sehingga BRBIH telah dapat menjual magot dan produk turunannya. Selama triwulan III BRBIH telah menyetorkan PNBP yang bersumber dari penggunaan

sarpras sesuai tusi berupa bangunan lab semi permanen ke pihak ke tiga dan sewa tanah bangunan untuk ATM serta penjualan ikan hias dan magot.

Faktor penentu keberhasilan atas tercapainya target pada tahun ini diantaranya:

- 1. Telah dilaksanakan pemasaran hasil produksi melalui komunitas ikan;
- 2. Kerja sama dengan mitra dan stakeholder;
- 3. Pengelolaan produksi ikan hias yang lebih efisien;
- 4. Penyelenggaran kegiatan Eduwisata dan kunjungan instansi;
- 5. Rapat tim PNBP dalam menentukan strategi pencapaian target.

Adapun setoran PNBP BRBIH sampai dengan Triwulan III ini bersumber dari:

- 1. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp 44.772.480,- yang bersumber dari setoran sewa kolam.
- 2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp 49.593.900,-yang bersumber dari setoran sewa lahan dan bangunan (lapangan bola, aula dan tanah aliran sungai).
- 3. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp 66.069.000,- yang bersumber dari hasil setoran penjualan ikan dan magot.

Kegiatan/Program yang telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya indikator ini yaitu Layanan Perkantoran dengan kegiatan berupa:

- 1. Budidaya ikan;
- 2. Budidaya Magot;
- 3. Pemeliharaan komoditas hasil samping kegiatan Pelatihan/ Magang/PKL;
- 4. Pengelolaan asset yang meliputi pemeliharaan asset agar dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan operasional, optimalisasi lahan yang tersedia untuk kegiatan produksi dan sewa.

Indikator Kinerja 8

Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai) merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi maximize.

Indikator Kinerja ini memiliki target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2025 sebesar 90 (sembilan puluh) dengan polarisasi *maximize*. Sejak Januari sampai dengan September 2025, untuk mendukung IKU ini, telah dilakukan pengumpulan data informasi publik dan mengumumkannya pada mesia elektronik dan non lektronik secara berkala. Pada tanggal 25 September BRBIH telah submit dokumen penilaian melalui aplikasi PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik), selain itu kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya target tersebut yaitu dengan mengumumkan Informasi Wajib Berkala berupa:

- Informasi tentang Profil Unit Organisasi (Deskripsi Tugas dan Fungsi, Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara, Mengumumkan Informasi Jumlah dan Prosentase yang wajib LHKSN)
- Informasi Program dan Kegiatan Organisasi (Mengumumkan Program atau Kegiatan Tahun 2025, Program dan Kegiatan Tahun 2024, Realisasi Kegiatan dan Capaian Kinerja)
- 3. Informasi Keuangan (Mengumumkan Laporan Keuangan Tahun 2024 : LRA, Neraca, CALK, Daftar Aset dan Investasi, Mengumumkan

- Informasi Keuangan Tahun 2024 : DIPA, RKA-KL, Realisasi Penyerapan Penggunaan Anggaran)
- 4. Pengadaan Barang dan Jasa (Mengumumkan rencana umum pengadaan, Mengumumkan dua paket tertinggi pengadaan), Selain itu mengumumkan informasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, Informasi Tersedia Setiap Saat & Pengadaan Barang dan Jasa, Dokumen Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga, Dokumen Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Unit Organisasi, Menyediakan Dokumen Kepegawaian, Menyediakan Dokumen Pengaduan, Menyediakan Data Akses Informasi Publik, Sarana dan Prasarana, Daftar Informasi Publik Online, Permintaan Informasi Online, Pengajuan Keberatan Online, Menyediakan Audio Visual yang Menayangkan Layanan Informasi, Meja Layanan Informasi (Ruang Layanan, Formulir, Sarana Pendukung, Maklumat, Survey Kepuasan, SOP PPID, Petugas Layanan), Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Menyediakan Legalitas PPID Pelaksanan, Menetapkan Kebijakan Pembinaaan Pelayanan, Penandatanganan Komitmen Bersama, Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan, Evaluasi dan Monitoring Pembinaan Kebijakan Informasi Publik, Menyediakan Anggaran Rutin Kegiatan Layanan dan bagi peningkatan kapasitas SDM, Penyampaian Informasi Publik melalui Media Sosial dan Inovasi Layanan Publik

Seluruh dokumen yang merupakan Informasi publik dapat diakses melalui website KKP, sedangkan untuk kebutuhan penilaian keterbukaan informasi publik pada LKE dapat diakses melalui G-Drive.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi pagu tahun 2025 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada BRBIH adalah sebesar Rp. 10.969.977.000,- (berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025) dengan capaian

realisasi sebesar Rp. 5.397.996.530,- atau 49,20%. Sedangkan realisasi yang bersumber dari spant kemenkeu per tanggal 30 september 2025 persentase realisasinya menjadi 69,55% dari pagu Rp 7.761.516.000,-. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan per sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU PADA PERJANJIAN KINERJA (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU PADA SPANT (Rp)	REALISASI (Rp)	% THD PAGU PK	% THD PAGU SPANT
Belanja Pegawai	4.559.977.000		4.559.977.000	3.039.340.769	66,65	66,65
Belanja Barang	6.410.000.000	3.208.461.000	3.201.539.000	2.358.655.761	36,79	73,67
Total	10.969.977.000		7.761.516.000	5.397.996.530	49,20	69,55

Tabel 17. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Triwulan III Tahun 2025

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU PADA PERJANJIAN KINERJA (Rp)	PAGU PADA SPANT (Rp)	REALISASI	% THD PAGU	% THD PAGU EFEKTIF
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	20.000.000	3.290.000	3.254.970	16,27	98,94
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	20.000.000	500.000	264700	1,32	52,94
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	22.000.000	5.895.000	3.318.797	15,09	56,30
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	30.000.000	3.200.000	1.668.300	5,56	52,13

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU PADA PERJANJIAN KINERJA (Rp)	PAGU PADA SPANT (Rp)	REALISASI	% THD PAGU	% THD PAGU EFEKTIF
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	30.000.000	3.665.000	3.664.944	12,22	100,00
		8	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	10.749.977.000	7.741.766.000	5.382.901.789	50,07	69,53
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	98.000.000	3.200.000	3.160.530	3,23	98,77
			Total	10.969.977.000	7.761.516.000	5.398.234.030	49,21	69,55

Pada tahun 2025, sumber dana yang diterima BRBIH berasal dari rupiah murni (RM). Sumber dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai capaian 9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam 1 Sasaran Kegiatan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terdapat 4 (empat) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2025

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Bulan pengesahan	2 Desember 2025	-
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	-
	Belanja barang	6.410.000.000	-
	Total	10.969.977.000	
1	Tanggal	2 Desember 2025	21 Februari 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Revisi Blokir Anggaran berdasaraka surat Sekretaris BPPSMKP Nomor Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Lingkup BPPSDM TA 2025	B.2492/BPPSDM.1/RC.420/II/2025
2	Tanggal	21 Februari 2025	9 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi				
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000				
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000				
		Revisi Rekomposisi Blokir Anggaran berdasarakan:					
	Keterangan	Surat Direktur Jenderal Anggar Perekonomian dan Kemaritima Tanggal 9 April 2025 Perihal Peng Penyuluhan dan Pengembangan dan Perikanan, Kementerian Kelaut	n Nomor S-327/AG/AG.3/2025 gesahan Revisi Anggaran Badan Sumber Daya Manusia Kelautan				
		Pada revisi ke 2 ini tidak terdapat perubahan pagu per jenis belanja, hanya ada pembukaan blokir belanja gaji PPNPN dan PJLP, belanja langganan daya dan jasa, serta honor keuangan.					
3	Tanggal	9 April 2025	21 April 2025				
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000				
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000				
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000				
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan D	ana pada Halaman III DIPA				
4	Tanggal	21 April 2025	8 Juli 2025				
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000				
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000				
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000				
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan De	ana pada Halaman III DIPA				

Secara umum kinerja penyerapan anggaran BRBIH selama Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan dapat tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan rencana operasional kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Bab 4 Penutup



IV. PENUTUP

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, BRBIH memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Kegiatan dan 9 Indikator Kinerja. Triwulan III Tahun 2025 terdapat 3 IK yang dilakukan pengukuran, dengan 1 IK berstatus biru dan 2 IK berstatus hijau, dengan 6 IK lainnya baru akan diukur pada Triwulan IV tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja BRBIH pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama, key perfomance indicator (KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRBIH pada triwulan ini sebesar 107,83%, sebagaimana dashboard kinerjaku berikut:



Gambar 9. Dashboard Kinerjaku BRBIH level 3 BRBIH

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 19. Capaian Kinerja BRBIH Triwulan III 2025

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	IN	DIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN III	CAPAIAN TRIWULAN III	%
1	1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	 	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	85	100,00
		2 I	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	-	-	-
			Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	-	-	-
	ddi'i ciikaran	F	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	-	-	-
		·	ndeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	-	-	-
		r } }	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	80	100	120,00
		F	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	-	-	-
			Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000	155.000.000	160.435.380	103,51
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-	-

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Pada Triwulan III 2025, kinerja BRBIH dapat tergolong baik, namun demikian secara umum masih terdapat permasalahan yang berpotensi untuk menghambat capaian kinerja di triwulan berikutnya, beberapa permasalahan berdasarkan sasaran kinerja utama beserta rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Target PNBP senilai 210.000.000 baru tercapai sebesar Rp.160.435.380,atau 76,40% dirasa masih sulit dicapai dengan kondisi adanya penurunan permintaan ikan hias dan magot di BRBIH. Untuk mengantisipasi tidak tercapainya target tersebut, maka direkomendasikan untuk melakukan promosi melalui media sosial dengan harapan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap ikan hias dan maggot.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRBIH. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH. Akhirnya, BRBIH berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



Lampiran





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

JALAN PERIKANAN NOMOR 13 PANCORAN MAS DEPOK 16436 TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973 LAMAN <u>www.kkp.go.kd</u> SUREL <u>brbihdepok13@gmail.com</u>

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS NOMOR: 19/BRBIH/RC.610/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

Menimbang :

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan uraian tugas serta penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias TA. 2025;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas dan telah memenuhi syarat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diperlukan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias mengenai Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kineria Instansi Pemerintah:
- 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- 6. Surat Pengesahan DIPA Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: SP DIPA-032.12.2.403830/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- 7. Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias dengan Kepala Pusat Riset Perikanan KKP TA. 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) BALAI RISET BUDIDAYA IKAN IIIAS TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU

Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU memilki tugas sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab: Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2025;
 - b. Ketua Tim Penyusun:

Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRBIH TA. 2025, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab Tim Penyusun LKJ;

Anggota Tim Penyusun: Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja BRBIH TA. 2025;

d. Sekretariat:

Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2025 lingkup BRBIH.

e. Kontributor: Menyampaikan data dan informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan kinerja (LKj)

KETIGA: Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

KEEEMPAT: Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

LAUTAD da tanggal 2 Januari 2025

RAAA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI RISET
BUDDAYA KAN HARYADI D

Tembusan:

- Sekretaris BPPSDM KP;
- 2. Pegawai yang bersangkutan.

- 4 -

Lampiran SK

Nomor : 19/BRBIH/RC.610/I/2025

: 2 Januari 2025 Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN		
(1)	(2)	(3)		
1	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias		
2	Ketua Tim Penyusun	Sub Bagian Umum		
3	Anggota Tim Penyusun	Subkoordinator Kelopok Tata Operasional Subkoordinator Kelompok Tata Usaha Subkoordinator Kelompok Pelayanan Teknis		
4	Sekretariat	Shella Savitri Iswahyudi Susiyanti Yuni Setyowati Ipan Dahniar		
5	Kontributor	Ifana Agustina Fitri Rahmawati Dewinta Hesti Widyastantri		

Ditetapkan di Depok AUTANE da Tanggal 2 Januari 2025 A PENGGUNA ANGGARAN HARYADI D

Tembusan:

- Sekretaris BPPSDM KP;
 Pegawai yang bersangkutan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Joni Haryadi

Jabatan

: Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama

: Rudi Alek Wahyudin

Jabatan

: Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin @

Pihak Kesatu Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

/ Joni Haryadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85
	bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber	2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92
	Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5
	ļ.	5.	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80
	8	8.	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000
	*	9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10,969,977,000	
Total	Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun 2025	10,969,977,000	

Jakarta, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin 🕢

PIHAK PERTAMA Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

/ Joni Haryadi

